

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Suatu Daerah

Lisa Novita Hartanti¹, Rahmat Hidayat², Prilla Marsingga³

¹ Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3} Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1810631180051@student.unsika.ac.id, HP. 085813955224

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Maret 2022

Direvisi: 5 Maret 2022

Dipublikasikan: Maret 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.6354910

Abstract:

One of the important aspects in the implementation of regional autonomy is the issue of regional financial independence. BUMD becomes a business entity whose capital is wholly or most of the capital owned by the region as well as an increase in Regional Original Income (PAD). In the context of helping regional financial independence as well, the existence of BUMDs participates and participates in carrying out regional development in particular and national economic development in general in the context of a guided economy to meet the needs of the people by prioritizing industrialization and peace and pleasure in working within the company, towards a just, prosperous, fair society, and prosperous based on sound economic principles. Researchers used qualitative methods in the form of literature studies and reduced documentation, presented, then drawing conclusions. The performance of BUMD in regional financial independence is also considered to be very lacking. Many BUMDs in regions have a high dependence on central government assistance as well as on regional revenues and the basis for charging fees, which PAD provided is still not reliable for regions for regional autonomy, due to the relatively low level of taxes or levies in the regions.

Keywords: BUMD, PAD, Independence, Regional Finance

PENDAHULUAN

Indonesia ialah salah satu negara besar yang berpeluang serta berpotensi ekonomi yang kini sangat menjanjikan.

Salah satunya melalui pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan maju, dimana akan menciptakan peluang

pasar yang bisa menggerakkan perekonomian. Secara umum diketahui memang indikator keberhasilan dari pembangunan suatu daerah salah satunya yakni pertumbuhan ekonomi. Namun daripada itu, tujuan yang paling utama dari hadirnya suatu pembangunan di suatu daerah yakni kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Sejak krisis ekonomi moneter pada pertengahan tahun 1997 yang terjadi, pembangunan di Indonesia mulai terhambat akibat dari pemerintah tidak mampu membiayai proyek besar pembangunan akibat kurangnya pendapatan pemerintah terkhusus yang bermuara pada sektor retribusi serta pajak daerah. Karena krisis ekonomi tersebut, mulai memuncullah kelemahan-kelemahan dari perekonomian nasional. Kurang meratanya pelaksanaan pembangunan di setiap daerah akhirnya membuat kesenjangan pertumbuhan antar daerah, dimana terjadi ketimpangan yang amat besar antara kawasan di perkotaan dan pedesaan, misalnya kawasan barat serta kawasan timur Indonesia, ataupun antar golongan yang ada di masyarakat membuat tak terhindarkan gejolak sosial di masyarakat.

Perubahan paradigma akhirnya dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah yang UU Nomor 22 Tahun 1999 atur mengenai Pemerintah Daerah. UU ini yang berlaku digadang berpeluang bagi setiap daerah guna dapat menggali berbagai potensi lokal daerahnya demi tercipta kemandirian keuangan daerah. Semenjak perundang-undangan ini dikeluarkan, maka secara ekonomi ataupun politis persoalan kemampuan keuangan daerah harus pemerintah daerah perhatikan. Isu penting dalam otonomi daerah saat ini perlu untuk diteliti serta diperbincangkan yaitu terkait sumber pendapatan daerah yang perlu digali guna menggantikan

penerimaan dari pemerintah pusat yang didapatkan sebagai ajang kemandirian keuangan dari daerah tersebut.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah usaha kepemilikan dari pemerintah daerah, badan usaha tersebut memiliki tujuan menjadi sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD). Namun realitanya selama ini BUMD yang ada belum bisa berkontribusi signifikan terhadap PAD, bahkan suntikan dana yang pemerintah daerah berikan lebih baik daripada laba yang diperoleh. Hal tersebut akhirnya menjadi beban bagi APBD daerah tersebut. Hal ini berimbas kepada tujuan berdirinya BUMD yang tidak tercapai sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah salah satunya.

Peranan dari BUMD yang cukup besar dalam menunjang kemandirian keuangan daerah ini realitanya masih belum sesuai keinginan. Masih sangat kecil kontribusi laba serta peran BUMD terkait penerimaan PAD di daerah. Hal itu akhirnya mengarah kepada lahirnya penyakit-penyakit badan usaha milik pemerintah ini. Maka dari itu, pemerintah daerah harus semakin dituntut agar dapat melakukan pengelolaan perusahaan dan keuangan daerah agar dapat berjalan secara lebih akuntabel, efisien, serta efektif dan pengelolaan penerimaan daerah pemerintah daerah usahakan secara lebih hati-hati, tepat dan cermat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis pada penelitian ini memilih mempergunakan metode penelitian kualitatif. Mengacu pemaparan dari Sugiono, penelitian yang lebih cocok dipergunakan dalam penelitian yang berjenis pemahaman mengenai fenomena sosial dari perspektif partisipannya ialah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007). Pendekatan tersebut dipergunakan oleh peneliti

dikarenakan dengan menggunakan metode tersebut masalah bisa tergambarkan secara jelas serta terperinci tentang pengaruh pengelolaan hasil BUMD dalam menunjang kemandirian keuangan suatu daerah.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur peneliti terapkan sebagai metode utama dalam memperoleh data literatur secara sistematis. (Sarwono, 2006). Pada Perolehan analisis penelitian ini berasal dari banyak sumber, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi (triangulasi), serta pelaksanaannya secara terus menerus terhadap pengaruh pengelolaan hasil BUMD dalam menunjang kemandirian keuangan suatu daerah.

Analisis data penelitian ini didapatkan dari hasil dokumentasi yang dilakukan menggunakan cara pengorganisasian kedalam kategori dari setiap data yang diperoleh, setiap unit dijabarkan, menjabarkan ke dalam beberapa unit, lalu disintesis, disusun ke dalam pola, menentukan bagian yang akan dipelajari serta yang penting, dan menyimpulkan agar diri sendiri ataupun orang lain mudah memahami. Metode pengujian kredibilitas data penelitian ini dilakukan dengan triangulasi teknik serta teknik triangulasi sumber selanjutnya setiap data tersebut direduksi, disajikan, kemudian penarikan kesimpulan terhadap pengaruh pengelolaan hasil BUMD dalam menunjang kemandirian keuangan suatu daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004 diterangkan dengan ringkas bahwa garis besarnya yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang didapatkan daerah serta

pengumpulannya dengan berdasar pada peraturan daerah sebagaimana keberlakuan aturan Undang-Undang yang ada. (UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). PAD menjadi sumber pendapatan daerah dimana salah satunya didapatkan melalui sumber penerimaan di daerah. Aries Djaenuri menjabarkan bahwasanya PAD ialah penerimaan yang daerah peroleh dari sumber di wilayah sendiri yang pengumpulannya berdasar pada aturan daerah sesuai berlakunya aturan Undang-Undang yang ada. (Djaenuri & Enceng, 2012)

Dana yang cukup banyak sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan hal tersebut membuat daerah tidak hanya bisa bergantung pada dana perimbangan dari pusat, sehingga potensi daerahnya masing-masing harus bisa daerah gali guna bisa dipakai menjadi pembiayaan pengeluaran rutin dan dalam era otonomi daerah ini pengeluaran pembangunan daerah tersebut guna meningkatkan pendapatannya. Hal tersebut bisa menjadi indikator penting dalam penilaian kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan dengan adanya PAD. (Jusva Rumende et al., 2019)

Pengelolaan PAD menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan khusus dalam manajemen penerimaan daerah. PAD haruslah menjadi sumber keuangan paling besar untuk pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut menandakan bahwasanya PAD ialah ukuran paling penting dalam melihat seberapa mampunya daerah mewujudkan otonomi daerah, menjadikan kemandirian daerah tergambar oleh PAD.

Konsep Kemandirian Keuangan Daerah

Masalah yang menjadi aspek terpenting dalam pelaksanaan otonomi

daerah ialah kemandirian keuangan daerah. Penilaian hak serta kewajiban daerah yang bisa dinilai melalui uang telah timbul akibat adanya pelaksanaan otonomi daerah sehingga dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah perlu dikelola secara bertanggungjawab, terbuka serta profesional sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni value for money (ekonomis, efisien, serta efektif), akuntabilitas serta transparansi sebagai alat menciptakan akuntabilitas publik (*accounting for governance*).

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan bahwa kegiatan pembangunan, pemerintahan dan layanannya pada masyarakat bagi yang telah membayar retribusi serta pajak sebagai sumber pendapatan yang daerah butuhkan mampu pemerintah daerah biayai secara mandiri. (Halim & Kusufi, 2002) Rasio pendapatan asli daerah atas Dana Perimbangan dan pinjaman menjadi indikator kemandirian keuangan suatu daerah, sehingga Dana Perimbangan serta PAD ialah pengeluaran dari pemerintah daerah berdampak positif pada pengeluaran pemerintah daerah.

Pengukuran dari mampu tidaknya daerah menjalankan otonomi daerah bisa melalui kinerja keuangan daerah dimana ini terlihat dari derajat desentralisasi fiskal serta kemandirian daerah. Cerminan pemerintah daerah yang bergantung pada daerah terhadap sumber dana pemerintah provinsi serta pusat ialah kemandirian keuangan daerah. Kemandirian tersebut yang makin tinggi, maka makin rendah kebergantungan daerah terhadap bantuan provinsi serta pemerintah. Selain itu kemandirian tersebut juga menjelaskan terkait tingkatan partisipan masyarakat dalam pembangunan daerah, tingginya kemandirian keuangan daerah mencerminkan keterlibatan masyarakat

dalam pembayaran retribusi daerah serta pajak makin tinggi juga. Komponen dalam PAD yakni pajak dan retribusi daerah. Gambaran yang memperlihatkan dari kemandirian keuangan daerah dari perbandingan pendapatan dari pemerintah pusat dengan PAD. (Suci & Asmara, 2014)

Peran dan Pengaruh BUMD Terhadap Kemandirian Keuangan Suatu Daerah

Pemerintah daerah dituntut bisa mengatur serta mengurus daerahnya sendiri seiring pelaksanaan otonomi daerah. Guna pengurusan serta pengaturan daerahnya tersebut sehingga sumber penerimaan daerah diperlukan, seperti Hasil BUMD. Konsekuensi dari otonomi daerah cukup besar bagi peran BUMD dalam menunjang PAD. Kegiatan ekonomi serta usaha daerah dari BUMD sebenarnya sejak lama sudah berjalan sebelum disahkannya UU terkait Otonomi Daerah.

Dalam upaya mendorong pembangunan dan kemandirian keuangan suatu daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah kian penting dirasa menjadi pelopor dalam sektor usaha yang pihak swasta belum minati. BUMD juga dituntut melaksanakan tugas menjadi pelaksana pelayanan publik terkhusus di bidang ekonomi, ikut membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah serta menjadi penyeimbang kekuatan pasar. Dalam hal menunjang kemandirian keuangan suatu daerah, hal ini tentunya sejalan dengan tujuan dari pembentukan BUMD itu sendiri. Umumnya manfaat akan dirasakan bagi perkembangan kemandirian perekonomian suatu daerah terkait hasil dari BUMD. Selain itu juga, hasil BUMD disalurkan untuk penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa menyediakan jasa atau barang dengan mutu terjamin bagi pemenuhan

kebutuhan masyarakat sesuai potensi daerah, karakteristik serta kondisi yang terkait sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka menunjang kemandirian keuangan daerah juga, keberadaan BUMD berperan turut serta dalam melakukan pembangunan daerah terkhusus pembangunannya ekonomi nasional biasanya bagi ekonomi terpinpin guna pemenuhan kebutuhan rakyat dengan diutamakan kesenangan kerja, ketentraman serta industrialisasi dalam perusahaan, menjadikan masyarakat sejahtera, adil, serta makmur sesuai asas ekonomi sehat. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwasanya BUMD didirikan dengan tujuan membuat BUMD menjadi tulang punggung ekonomi daerah serta menjadi wujud pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan, sehingga wajib bagi BUMD menjadi tulang punggung serta penggerak ekonomi daerah yang nantinya berwujud kontribusi terhadap keuangan nasional.

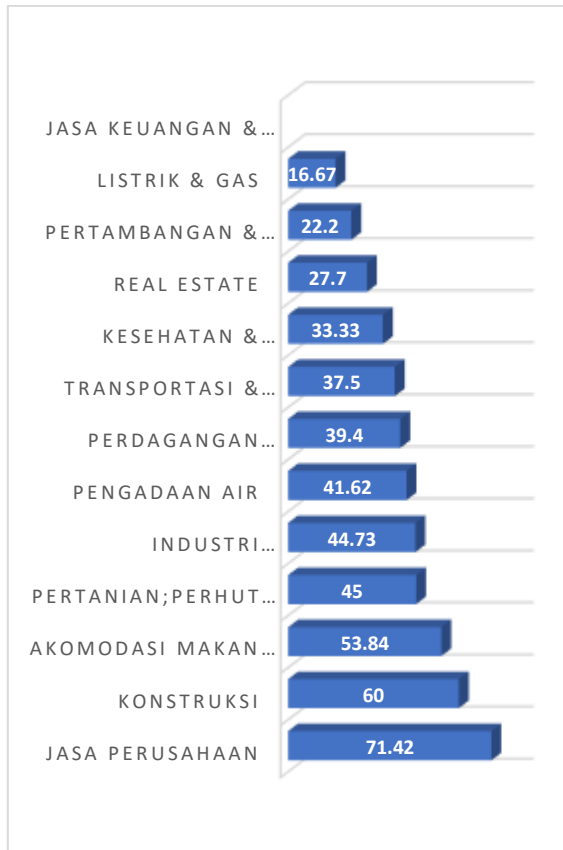
Kinerja BUMD dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Suatu Daerah

Racmawati (2004) menjabarkan bahwasanya, kinerja ialah catatan terkait berbagai hasil yang didapatkan dari suatu fungsi pekerjaan dalam suatu waktu. Kinerja BUMD sebagai penunjang kemandirian keuangan daerah adalah pengelolaan BUMD guna meningkatkan efisiensi keuangan yang menjadi salah satu agenda revitalisasi BUMD, serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur sesuai asas-asas ekonomi yang sehat. Namun, BUMD yang berjumlah banyak di suatu daerah tidak otomatis memberikan jaminan bahwa entitas bisnis tersebut secara keseluruhan bisa secara baik berkembang dalam menunjang

kemandirian keuangannya. (Sukmana & Firmansyah, 2016)

Sekarang ini BUMD yang belum mampu memberikan bagi hasil maksimal kepada daerah masih banyak. Pada tahun 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo mencatat masih buruk kinerja dari BUMD hingga sekarang ini. Hal tersebut terlihat dari keadaan keuangan mereka. Sekarang ini Catatan Kementerian Dalam Negeri, terdapat 1.097 BUMD di seluruh Indonesia. Aset ke-1.097 BUMD tersebut totalnya mencapai Rp 340,118 triliun. Namun dari ribuan BUMD itu, penghasilan jumlah laba hanya Rp10 triliun saja. Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo mengemukakan kecilnya jumlah laba itu dikarenakan banyak BUMD yang merugi.

Dalam pengelolaan BUMD yang menjadi masalah utama bagi pengelola BUMD yaitu pengelolaan belum semua BUMD terapkan. Masalah tersebut timbul karena karakteristik serta struktur BUMD tidak sama di tiap daerah. Sistem pengelolaan BUMD yang berbeda karena BUMD memiliki karakteristik yang tidak sama. Sekarang ini kondisi itu menimbulkan sulitnya BUMD menghadapi persaingan usaha dengan lincah, serta bergantung pada APBD. Jumlah BUMD di daerah secara kuantitas terkhusus dengan bentuk perseroan jumlahnya melebihi satu di tiap daerah, sehingga pengelompokkan serta pemetaan perlu dilakukan.



Gambar 1. Presentasi Perusahaan BUMD yang Merugi Tahun 2020
Sumber : BPS,2020

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat perusahaan BUMD yang tidak memperoleh laba atau mengalami kerugian pada 2020, yaitu sebanyak 286 perusahaan. Jumlah itu setara dengan 33,72% dari total perusahaan BUMD yang ada di Indonesia, yakni 848 perusahaan. Berdasarkan kategori lapangan usaha, persentase perusahaan BUMD yang mengalami kerugian pada 2020 paling banyak pada kategori jasa perusahaan, yakni 71,42%. Tercatat, ada 10 perusahaan yang rugi dari total sebanyak 14 perusahaan pada kategori tersebut. Kemudian, diikuti oleh kategori konstruksi dengan persentase perusahaan yang mengalami kerugian sebanyak 60%. Selanjutnya pada kategori penyediaan akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi ada sebanyak 53,84%

perusahaan yang mengalami kerugian. Adapun, persentase perusahaan BUMD yang mengalami kerugian pada 2020 paling sedikit, yaitu pada kategori jasa keuangan dan asuransi, yakni 12,9%. Pada kategori tersebut, tercatat ada 28 perusahaan yang rugi dari total sebanyak 217 perusahaan. (Statistik, 2020)

Kinerja BUMD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah dinilai juga masih sangat kurang. Banyak BUMD di daerah-daerah yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat lewat dana perimbangan, dimana kemandirian pemerintah daerah tidaklah mendominasi seperti peran pemerintah pusat. Begitupun pada dasar pengenaan biaya serta penerimaan daerah, yang nampaknya masih belum bisa diandalkannya PAD untuk daerah demi kelangsungan otonomi daerah, sebab basis pajak atau retribusi di daerah relatif rendah. (Orocomna et al., 2018)

Cukup besar keterlibatan pemerintah terhadap berjalannya organisasi BUMD dan terdapat wewenang yang terbatas dalam penyelenggaraan perusahaan. Kemudian terkait penempatan direksi sering kali berkaitan dengan pertimbangan KKN atau kedekatan pimpinan daerah dengan para calon. Tidak sedikit penempatan direksi dalam hubungan ini hingga kurangnya tenaga kerja didasari oleh pertimbangan keterampilan dan profesionalisme, dan bahkan pula penempatan di perusahaan daerah tersebut menjadi “tempat buangan” untuk seorang pejabat yang kedudukannya sudah tergeserkan.

Peran BUMD yang cukup penting utamanya termasuk sebagai sumber PAD di daerah, BUMD tentunya diharuskan supaya lebih profesional dan efisien dalam menjalankan usaha yang ada. Telah banyak dilakukan upaya serta kebijakan ke arah tersebut. Maka dari itu, perlu dioptimalkan BUMD dalam

pengelolaannya supaya kekuatan ekonomi benar-benar handal sehingga bisa aktif berperan, baik saat melaksanakan fungsi serta tugasnya ataupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Strategi BUMD dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Suatu Daerah

Ginandjar Kartasasmita (1996) menjabarkan bahwasanya pemberdayaan masyarakat (beserta kelembagaannya, termasuk BUMD) ialah upaya peningkatan harkat serta lapisan masyarakat dalam keadaan sekarang ini tidak bisa melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan serta kemiskinan. (Ginandjar, 1994). Hal tersebut menandakan memberdayakan itu ialah memandirikan serta memampukan masyarakat dan juga kelembagaan di dalamnya, yang mana termasuk pula BUMD. Upaya memberdayakan itu khususnya menyangkut BUMD, maka pertamanya harus dengan penciptaan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi untuk berkembang. Hal tersebut berlandaskan pada pertimbangan bahwasanya setiap masyarakat beserta kelembagaannya, berpotensi yang bisa dikembangkan. Sehingga melalui pemberdayaan tersebut pertama termasuk langkah dalam membangun daya dengan membangkitkan, memberikan motivasi, serta mendorong kesadaran akan daya (potensi) yang dimiliki dan berusaha mengembangkan potensi tersebut.

Kedua yakni memperkuat daya atau potensi yang dimiliki, hal tersebut dibutuhkan pembukaan akses kepada berbagai peluang, penyediaan berbagai input-input yang dibutuhkan, dan langkah yang lebih nyata serta positif sehingga pemanfaatan peluang semakin berdaya. Ketiga, memberdayakan

artinya melindungi, oleh karena itu pada proses pemberdayaan harus dicegah supaya pihak yang lemah tidak menjadi semakin lemah, akan tetapi bisa hidup dengan daya saing yang cukup.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyehatan BUMD. Penyehatan ialah kinerja BUMD ditingkatkan dalam kontribusi atau pelayanan publik pada PAD yang berpengaruh pada ekonomi daerah serta menunjang ekonomi nasional. Sehatnya BUMD akan bisa berfungsi menjadi penyumbang bagi penerimaan daerah, baik berbentuk hasil privatisasi, dividen atau pajak.

Perbaikan kinerja BUMD dalam kaitannya menjadi bentuk kemandirian keuangan suatu daerah, dijelaskan tindakan serta langkah yang bisa dilaksanakan guna perbaikan dari kinerja usaha BUMD, adanya tindakan dengan sifat strategis yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa strategi yang meliputi:

1. Strategi Pengusahaan Perusahaan BUMD

Strategi pengusahaan yang bisa dilaksanakan dengan tindakan atau langkah memperbaiki kinerja perusahaan, di antaranya melalui mengatasi kelemahan internal dimana antaranya lain dengan perbaikan sistem organisasi; memaksimalkan kekuatan internal melalui memfokuskan terhadap bisnis dengan prospek tinggi, mencari dan mempertahankan pelanggan baru supaya jaringan pasar meluas, teknik produksi yang baru dicari guna menunjang peningkatan efisiensi usaha; teratasinya ancaman eksternal melalui perbaikan mutu jasa serta produk, kualitas SDM ditingkatkan serta peningkatan keaktifan dan kreativitas tenaga pemasaran dalam pencarian inovasi terbaru; serta peluang

eksternal dimaksimalkan, dengan cara lewat upaya kerjasama dengan perusahaan sejenis yang saling menguntungkan. Serta kerja sama tersebut bisa dilaksanakan dalam bentuk BOO, BOT, joint venture dan lainnya.

2. Strategi Penumbuhan Perusahaan BUMD

Guna pengembangan serta menumbuhkan perusahaan berdasar ukuran besaran yang disepakati untuk meraih tujuan perusahaan yang sifatnya jangka panjang. BUMD dinilai tumbuh apabila perusahaan daerah mampu menaikkan aset perusahaan, besarnya laba, pangsa pasar serta volume penjualan. Tindakan yang bisa dilaksanakan supaya perusahaan bisa terus berkembang yakni integrasi horizontal dan/atau vertikal, pengembangan produk baru, melakukan perluasan pasar, serta memfokuskan bisnis pada produk yang representatif.

3. Strategi Penyehatan Perusahaan BUMD

Strategi yang dilaksanakan lewat pendekatan operasional serta strategik. Pendekatan strategik, seperti adanya kekeliruan strategis semacam tidak mempunyai perusahaan untuk memenuhi apa yang konsumen butuhkan sesuai tujuannya, sehingga penilaian secara keseluruhan pada bisnis perlu dilaksanakan guna menyempurnakan atau merubah. Sementara pendekatan operasional tertuju pada merubah operasi perusahaan dengan tidak mengganti strategi bisnis.

Arti dari upaya perbaikan kinerja ialah langkah pemberdayaan, dari BUMD di daerah-daerah dimasa depan. Selain itu usaha BUMD yang sudah berlangsung berdasarkan keterbatasan

dan rendahnya kinerja yang ada di masa lampau, juga diperlukan pemikiran secara lebih lanjut atas usaha BUMN yang hendak didirikan dan dibangun ke depannya untuk lebih memberdayakan dalam mendukung perekonomian daerah dan keuangan daerah.

Supaya dapat menunjang kemandirian keuangan yang sesuai keinginan pasar serta kebutuhan daerah, maka sebagai perusahaan harus berani BUMD membuka diri. Keterbukaan tersebut berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dijalankan serta di emban. Makna dari kemauan membuka diri dengan bentuk penerimaan saham ialah kesediaan dalam bertanggung jawab pada investor atau pemegang saham. Tidak hanya itu saja, berdasarkan pengelompokan kriteria atas kontribusi laba BUMD terhadap PAD, maka pemerintah diharapkan bisa melakukan pengelolaan atas BUMD supaya kontribusi yang dihasilkan bisa naik sehingga sangat baik kriterianya terhadap suatu daerah dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

BUMD ialah badan usaha yang sebagian atau seluruh besar modalnya daerah miliki. Pelaksanaan otonomi daerah membuat pemerintah daerah dituntut bisa mengatur serta mengurus daerahnya. Untuk menunjang kemandirian keuangannya tersebut maka sumber-sumber penerimaan daerah dibutuhkan, misalnya hasil BUMD. Dalam menunjang kemandirian keuangan suatu daerah, hasil BUMD disalurkan untuk penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa menyediakan jasa atau barang yang bermutu bagi kebutuhan masyarakat berdasar potensi, karakteristik serta kondisi daerah yang berkaitan berdasar tata kelola perusahaan yang baik.

Sehatnya BUMD akan bisa berfungsi menjadi penyumbang bagi penerimaan daerah, berbentuk hasil privatisasi, dividen ataupun pajak. Namun hingga saat ini, kinerja BUMD dalam menunjang kemandirian keuangan daerah dinilai masih sangat kurang. Banyak BUMD di daerah-daerah yang sangat bergantung pada pemerintah pusat lewat bantuan Dana Perimbangan, dimana kemandirian pemerintah daerah tidaklah mendominasi seperti peran pemerintah pusat. Peran BUMD yang dipandang cukup penting utamanya menjadi sumber PAD, pastinya BUMD diharuskan supaya lebih efisien serta profesional menjalankannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diharapkan BUMD dapat menjadi penggerak dan tulang punggung ekonomi daerah yang wujudnya nanti adalah kontribusinya terhadap kemandirian keuangan sebuah daerah. BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Hal tersebut ditujukan agar BUMD dapat memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat. Dengan ini penulis berharap bagi peneliti lanjut yang hendak meneliti terkait dengan masalah penelitian diharap dapat menemukan data yang lebih detail lagi sehingga nantinya pemecahan masalah yang berkenaan dengan peran BUMD dalam menunjang kemandirian suatu daerah dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Djaenuri, H. A., & Enceng. (2012).

Hubungan Keuangan Pusat-Daerah: Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (B. Pratiwi (ed.); Ketiga). Universitas Terbuka.

Ginandjar, K. (1994). *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Pustaka CIDESINDO.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2002). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi Keuangan Daerah* (Keempat). Salemba Empat.

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2004). file:///C:/Users/Lisa/Downloads/U U Nomor 33 Tahun 2004.pdf

Jusva Rumende, H., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di PT. Bank Sulutgo). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Volume 19, 5*. https://www.researchgate.net/publication/334329948_ANALISIS_KONTRIBUSI_BADAN_USAHA_MILIK_DAERAH_BUMD_TERHADAP_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PROVINSI_SULAWESI_UTARA_STUDI_DI_PT_BANK_SULUTGO

Orocomna, M., Bharanti, B. E., & Layuk, P. K. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, Vol. 2 No., 11*.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Cetakan Pe). Graha Ilmu.

Statistik, B. P. (2020). *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik*

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Financial Statistics of State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises (dan P. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi (ed.)). Badan Pusat Statistik.

- Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, Vol 3 No 1*, 8.
file:///C:/Users/Lisa/Downloads/19934-Article Text-61266-1-10-20180204.pdf
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sukmana, W., & Firmansyah, I. (2016). Analisis Problematika Kinerja Bumd Non-Keuangan Di Jawa Barat : Aplikasi Metode Analytic Network Process. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 4(2), 48–62.